

Penutupan Kampung Kumuh di India pada Pelaksanaan KTT G20 Tahun 2023: Spektakel Kota, Pencitraan Negara, dan Eksklusi Sosial

Sukma Nur Fitriani¹, Anna Yulia Hartati^{2✉}, Achmad Maulani³,
Azmi Muttaqin⁴

Universitas Wahid Hasyim

Email: annayulia@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2023 di India menjadi momentum strategis bagi negara tersebut untuk menegaskan posisinya sebagai kekuatan global baru, khususnya sebagai representasi Global South. Namun, di balik upaya pencitraan internasional tersebut, muncul kebijakan kontroversial berupa penutupan dan penggusuran kampung kumuh di New Delhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi pencitraan negara dan pengelolaan ruang kota dengan menggunakan teori spektakel kota Guy Debord. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka terhadap dokumen pemerintah, laporan organisasi masyarakat sipil, pemberitaan media nasional dan internasional, serta literatur akademik terkait urbanisasi dan politik kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan kampung kumuh tidak semata-mata merupakan kebijakan penataan kota, melainkan berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, kapitalisme perkotaan, kontrol sosial, dan nation branding. Kebijakan ini berhasil membangun citra visual kota yang modern dan tertib, namun pada saat yang sama mengorbankan hak-hak dasar masyarakat miskin, terutama hak atas tempat tinggal dan mata pencaharian. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan sosial, serta menolak praktik pembangunan yang hanya berorientasi pada pencitraan visual dan kepentingan diplomasi internasional.

Kata kunci: *G20_India, kampung_kumuh, spektakel_kota, pencitraan_negara, kapitalisme_perkotaan*

1. Pendahuluan

Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, India semakin menonjol di panggung internasional bukan hanya karena jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonominya yang cepat, tetapi juga karena meningkatnya ambisi dalam politik luar negerinya. Salah satu forum global yang penting bagi India untuk menampilkan kepemimpinannya adalah G20. Pada tahun

2023, India mendapat kesempatan strategis menjadi tuan rumah KTT G20 dengan mengangkat tema “Satu Bumi, Satu Keluarga, Satu Masa Depan.” Tema ini bertujuan menegaskan posisi India sebagai wakil Global South sekaligus membangun citra negara sebagai kekuatan dunia yang bertanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan, kerja sama internasional, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, KTT G20 dianggap sebagai kesempatan penting bagi India untuk memperkuat perannya sebagai pemain utama dalam politik dan ekonomi global.¹

Di balik kemegahan dan simbolisme selama acara, muncul kontroversi besar yang menarik perhatian masyarakat baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Pemerintah India menerapkan kebijakan tata kota yang meliputi penutupan dan penggusuran kampung kumuh di New Delhi. Ribuan warga miskin terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, kawasan organisasi informal ditutupi dengan tirai hijau besar agar tidak terlihat oleh delegasi internasional, dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di sekitar lokasi acara dikontrol secara ketat. Kebijakan ini mencerminkan prioritas pemerintah yang lebih mengedepankan pencitraan visual kota daripada penyelesaian nyata terhadap masalah kemiskinan di perkotaan.

Fenomena seperti ini bukanlah hal baru dalam sejarah urbanisasi di India. Sejak tahun 1970-an, penggusuran dan penutupan kampung kumuh sudah sering dilakukan, terutama saat India menjadi tuan rumah acara besar seperti Asian Games 1982 dan Commonwealth Games 2010, serta ketika ada kunjungan kenegaraan penting. Namun, skala penggusuran pada KTT G20 2023 jauh lebih luas dan intensif, sehingga menimbulkan penyiaran publik yang lebih intens. Banyak pengamat melihat tindakan ini sebagai bentuk “kosmetika kota” atau kebijakan kota yang hanya fokus pada menutupi masalah sosial secara permukaan, tanpa menyentuh akar

¹ Ministry of Earth Sciences, Government of India, "India's G20 Presidency and Priorities," tersedia di https://moes.gov.in/g20-india-2023/moes-g20?lingual_content_entity=en, diakses pada 20 Agustus 2025.

permasalahan struktural yang menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan di perkotaan.²

Kontroversi ini menekankan pentingnya penelitian tentang kebijakan penutupan kampung kumuh, terutama dalam konteks hubungan antara pembangunan kota, kekuasaan, dan pencitraan negara di era globalisasi. Penelitian ini berusaha mengkaji secara kritis bagaimana kebijakan yang tampak sederhana—seperti penggusuran kampung kumuh—sebenarnya merupakan bagian dari strategi politik yang lebih luas untuk membentuk citra negara di tingkat internasional. Oleh karena itu, teori *spektakel kota* dari analisis Guy Debord dipilih sebagai kerangka, karena teori ini menjelaskan bagaimana realitas sosial kerap kali menjadi pertunjukan visual, sementara ketegangan dan konsert yang terkandung di dalamnya sengaja disembunyikan.

Penutupan kampung kumuh di New Delhi menjelang KTT G20 2023 dapat dipahami sebagai praktik produksi ruang yang eksklusif dan sarat kepentingan kekuasaan. Dalam perspektif Henri Lefebvre, ruang kota bukan sekadar ruang fisik, melainkan ruang sosial yang diproduksi melalui relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Konsep *right to the city* menegaskan bahwa seluruh warga kota, termasuk masyarakat miskin, memiliki hak untuk tinggal, menggunakan, dan membentuk ruang kota. Namun, kebijakan penggusuran dan penutupan kawasan kumuh menunjukkan perampasan hak tersebut, karena ruang kota diprioritaskan bagi kepentingan negara dan aktor global, sementara warga miskin dipinggirkan dari ruang hidupnya sendiri.

Selanjutnya, praktik ini juga mencerminkan logika kapitalisme perkotaan sebagaimana dikemukakan oleh David Harvey. Harvey menjelaskan bahwa kota kerap dijadikan arena akumulasi modal, di mana penataan ruang diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya tarik investasi. Dalam konteks KTT G20, New Delhi diposisikan sebagai komoditas visual yang harus tampil modern, bersih, dan tertib agar selaras

² Kevin Millington, *The Impact of the Commonwealth Games 2010 on Urban Development of Delhi* (SSRN Paper No. 944832, May 2006), tersedia di https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=944832, diakses pada 20 Agustus 2025.

dengan kepentingan pasar global dan diplomasi ekonomi. Kampung kumuh, yang dianggap tidak produktif secara ekonomi dan merusak citra kota, kemudian diperlakukan sebagai hambatan bagi proses akumulasi kapital dan karenanya disingkirkan. Hal ini menunjukkan bagaimana pembangunan kota beroperasi dengan mengorbankan kelompok rentan demi kepentingan ekonomi dan citra global.

Sementara itu, dari sudut pandang Michel Foucault, kebijakan penutupan kampung kumuh juga dapat dibaca sebagai bentuk kontrol sosial atas ruang. Negara menggunakan mekanisme pengawasan, pembatasan mobilitas, dan pengaturan visibilitas untuk mendisiplinkan tubuh dan aktivitas masyarakat miskin. Pemasangan tirai hijau, pembatasan aktivitas ekonomi informal, serta kehadiran aparat keamanan di ruang publik merupakan bentuk governmentality, di mana kekuasaan bekerja tidak hanya melalui hukum formal, tetapi juga melalui pengelolaan ruang dan pengaturan apa yang boleh dan tidak boleh terlihat. Dengan cara ini, warga miskin dipaksa “menghilang” dari lanskap kota demi menjaga narasi ketertiban dan modernitas.

Dengan mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut, terlihat bahwa penutupan kampung kumuh bukanlah kebijakan teknis semata, melainkan praktik multidimensional yang melibatkan perampasan hak atas kota (Lefebvre), reproduksi kapitalisme perkotaan (Harvey), dan kontrol sosial melalui pengelolaan ruang (Foucault). Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana kota dijadikan arena spektakel dan kekuasaan, di mana citra global lebih diutamakan daripada keadilan sosial dan hak-hak dasar warga.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan penutupan kampung kumuh sebagai praktik pencitraan negara dan pengelolaan ruang kota, yang membutuhkan penelaahan kritis terhadap narasi, wacana, dan representasi, bukan pengukuran kuantitatif. Sumber data terdiri atas dokumen resmi pemerintah India terkait KTT G20 2023, laporan organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia,

pemberitaan media nasional dan internasional, serta literatur akademik yang membahas spektakel kota, kapitalisme perkotaan, hak atas kota, dan politik ruang.

Data dianalisis menggunakan analisis wacana kritis dan analisis kebijakan. Analisis wacana kritis digunakan untuk mengkaji bagaimana bahasa dan representasi visual membangun citra kota modern sekaligus menutupi realitas kemiskinan. Sementara itu, analisis kebijakan digunakan untuk menelaah kepentingan, tujuan, dan dampak sosial dari kebijakan penutupan kampung kumuh. Proses analisis dilakukan melalui pembacaan kritis, pengelompokan tema, dan interpretasi data dengan menggunakan kerangka teoritis Guy Debord, Henri Lefebvre, David Harvey, dan Michel Foucault.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Konteks Sosial-Politik India Menjelang KTT G20 2023

India saat ini menghadapi tantangan struktural yang kompleks terkait urbanisasi, kesenjangan sosial, dan kemiskinan. Pada tahun 2023, populasi India telah mencapai lebih dari 1,4 miliar jiwa, menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sekitar separuh populasi tersebut tinggal di wilayah perkotaan, terutama di kota-kota besar seperti New Delhi, Mumbai, Kolkata, dan Bengaluru. Migrasi besar-besaran dari pedesaan ke kota selama beberapa dekade terakhir telah mendorong pertumbuhan pesat kawasan kumuh, karena laju urbanisasi yang cepat tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan, infrastruktur, dan kesempatan kerja yang memadai. Akibatnya, kampung kumuh berkembang menjadi solusi tempat tinggal informal bagi masyarakat miskin, meskipun kondisinya jauh dari standar kelayakan.³

New Delhi, sebagai ibu kota sekaligus pusat politik, pemerintahan, dan ekonomi India, berfungsi sebagai representasi

³ Opcit

utama negara-negara tersebut di panggung dunia. Berbagai kegiatan internasional, khususnya konferensi tingkat tinggi seperti G20, menjadikan kota ini pusat perhatian global. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras untuk memproyeksikan citra kota yang modern, bersih, dan teratur, yang sejalan dengan narasi pertumbuhan India sebagai kekuatan ekonomi baru. Dalam konteks ini, kebijakan tata kota yang bersifat represif dan fokus pada pencitraan kosmetik sering diterapkan, terutama menjelang penyelenggaraan acara besar berskala internasional.

Pemerintah mengambil langkah nyata selama persiapan KTT G20 2023 dengan melakukan berbagai tindakan dramatis, seperti penggusuran paksa kampung kumuh di beberapa lokasi strategis, pemasangan tirai hijau besar di sepanjang rute delegasi untuk menyembunyikan kawasan kumuh, serta menggerakkan aktivitas ekonomi warga miskin di sekitar area acara. Kebijakan ini bertujuan agar delegasi internasional tidak melihat kondisi kemiskinan yang masih ada di India, sehingga citra kota yang terlihat adalah gambaran kemajuan dan modernitas.⁴

Namun tindakan tersebut mendapat kecaman keras dari berbagai pihak, terutama aktivis hak asasi manusia, akademisi, dan media internasional. Kritik utama yang menyoroti bahwa kebijakan ini jelas melanggar hak atas tempat tinggal yang layak sesuai dengan hukum internasional serta mengabaikan hak warga negara untuk hidup dengan martabat. Ribuan warga miskin kehilangan tempat tinggal tanpa pemberitahuan yang layak, dan dalam beberapa kasus penggusuran hanya berlangsung beberapa hari sebelum acara dimulai. Pindahan secara paksa dilakukan tanpa jaminan rehabilitasi yang memadai, sehingga banyak keluarga terpaksa tinggal di tenda darurat

⁴ Tempo.co, "Jelang KTT G20, Kawasan Kumuh di India Lenyap dalam Sekejap," diakses pada 19 Agustus 2025, tersedia secara daring di <https://www.tempo.co/internasional/jelang-ktt-g20-kawasan-kumuh-di-india-lenyap-dalam-sekejap-147579>.

atau di lahan pinggir kota yang minim akses air bersih, listrik, dan layanan kesehatan.

Kritik terhadap kebijakan penataan kota oleh pemerintah India menekankan bahwa fokus utama lebih pada penampilan visual kota di mata delegasi internasional daripada penyelesaian masalah mendasar kemiskinan di perkotaan. Dengan kata lain, kebijakan tersebut lebih bersifat pencitraan sementara dan permukaan, bukan solusi jangka panjang yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin yang terdampak. Situasi ini mencerminkan kontradiksi utama dalam pembangunan kota di India: di satu sisi berupaya menjadi simbol kebangkitan global, namun di sisi lain gagal memenuhi kebutuhan dasar sebagian besar penduduknya.⁵

b. Teori Spektakel Kota Guy Debord

Guy Debord dalam bukunya *The Society of the Spectacle* menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, kehidupan sosial telah berubah menjadi sebuah pertunjukan visual—sebuah tatanan sosial yang tidak lagi bergantung pada interaksi nyata, melainkan lingkungan menjadi gambar, citra, dan simbol. Dalam konteks ini, kota diperlakukan seperti panggung teater yang diatur khusus untuk menampilkan citra tertentu sesuai dengan kepentingan politik dan penguasa ekonomi. Fokus pada citra visual ini menyebabkan kenyataan sebenarnya, terutama masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan, sering kali disembunyikan di balik tirai simbolis demi mempertahankan citra negara. Praktik ini terlihat jelas dalam penutupan kampung kumuh di India menjelang KTT G20, di mana kota modern dipamerkan sebagai lambang kemajuan, keteraturan, dan kemakmuran, sementara kemiskinan, penggusuran, dan penderitaan warga marginal secara sistematis digambarkan dari pandangan dunia internasional. Dengan demikian, kota bukan hanya menjadi ruang hidup yang mencerminkan realitas sosial, melainkan juga menjadi

⁵ Opcit

panggung simbolik yang mengedepankan estetika visual di atas substansi, sekaligus menampilkan bagaimana citra politik bekerja dalam era globalisasi saat ini.

Guy Debord dalam bukunya *The Society of the Spectacle* menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, kehidupan sosial berubah menjadi sebuah pertunjukan visual, di mana hubungan sosial yang sejati digantikan oleh citra dan simbol semata. Kota dalam konteks ini dipandang sebagai panggung yang dirancang khusus untuk menampilkan citra tertentu sesuai dengan kepentingan politik dan penguasa ekonomi.⁶

Fokus pada penampilan visual kota ini menyebabkan kenyataan yang sebenarnya, terutama masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan, sering disembunyikan di balik tirai simbolis demi menjaga citra negara. Praktik ini nyata terlihat dalam penutupan kampung kumuh di India menjelang KTT G20, di mana kota modern dipromosikan sebagai simbol kemajuan, keteraturan, dan kemakmuran, sementara kemiskinan, penggusuran, dan penderitaan masyarakat termarginalkan secara sistematis dicatat dari pandangan dunia internasional. Dengan demikian, kota tidak hanya berfungsi sebagai ruang sosial yang nyata, tetapi juga sebagai panggung simbolik yang menempatkan estetika visual di atas substansi, sekaligus mencerminkan cara kerja citra politik dalam era globalisasi kontemporer.

c. Penutupan Kampung Kumuh sebagai Alat Kekuasaan

Kebijakan penutupan kampung kumuh menunjukkan bagaimana negara memanfaatkan ruang kota sebagai alat kekuasaan. Pemerintah India secara sistematis menyingkirkan gambaran kemiskinan dengan cara menyembunyikannya dari pandangan internasional. Tindakan seperti pemasangan tirai hijau di sepanjang jalur delegasi,

⁶ Guy Debord, *The Society of the Spectacle*, trans. Ken Knabb (Berkeley: Bureau of Public Secrets, 2014), 4. "The spectacle is not a collection of images; it is a social relation between people that is mediated by images." Diakses pada 21 Juni 2025

penggusuran mendadak, dan mengatur aktivitas warga mencerminkan strategi visual yang bertujuan menampilkan citra kota modern dan tertib.⁷

Guy Debord menyebut kondisi ini sebagai *spektakel*, di mana realitas sosial ekosistem menjadi sekadar gambar dan simbol sehingga yang ditampilkan hanyalah citra yang ingin dikontrol oleh penguasa. Kota seperti panggung pertunjukan yang diperlakukan, sementara kemiskinan dianggap sebagai gangguan visual yang harus dihilangkan atau dihilangkan.

Namun, kapitalisme di perkotaan menimbulkan paradoks, di mana di saat kota ditata dan didekorasi dengan indah, ribuan warga miskin justru kehilangan rumah dan sumber penghidupan mereka. Proses akumulasi modal berlangsung dengan mengabaikan hak-hak fundamental masyarakat yang termarginalkan. Guy Debord dalam bukunya *The Society of the Spectacle* mengemukakan bahwa dalam masyarakat modern, kehidupan sosial telah berubah menjadi sebuah *spektakel*, di mana realitas sosial menjadi gambar dan simbol semata. Kota menjadi semacam panggung pertunjukan yang digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Praktik ini terlihat jelas dalam penutupan kampung kumuh di India, di mana kota modern dipandang sebagai gambaran kemajuan, sementara kemiskinan yang sebenarnya disembunyikan dari pandangan dunia internasional.

d. Penutupan Kampung Kumuh sebagai Instrumen Kapitalisme

Penutupan kampung kumuh sangat terkait dengan logika kapitalisme perkotaan, di mana ruang kota diproduksi, dibentuk, dan dirancang agar menarik bagi investor, wisatawan, dan pengunjung internasional. Dalam era globalisasi, kota tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi penduduknya, tetapi juga dianggap sebagai komoditas yang bisa dipasarkan ke dunia luar. Dalam konteks KTT G20, New Delhi digunakan sebagai etalase modernitas untuk

⁷ Opcit

menunjukkan citra India sebagai negara yang stabil, maju, dan menarik bagi investasi global. Oleh karena itu, penampilan kota yang dipersembahkan kepada dunia harus bebas dari gambaran kemiskinan, sehingga kehadiran kampung kumuh dipandang sebagai hambatan yang harus dihilangkan dari lanskap perkotaan.⁸

Penggusuran kawasan kumuh kemudian dipandang sebagai strategi yang sah secara politik dan ekonomi karena membuka peluang bagi pembangunan infrastruktur baru, transportasi modern, hotel mewah, dan kawasan komersial yang investasi menarik. Praktik ini bukanlah hal yang eksklusif bagi India, melainkan bagian dari tren pembaruan kota secara global, seperti yang terjadi di Rio de Janeiro menjelang Olimpiade 2016 dan Beijing saat Olimpiade 2008, di mana penduduk miskin kota secara sistematis terpinggirkan untuk memberi ruang bagi proyek besar yang menguntungkan investor. Dengan demikian, pembangunan perkotaan cenderung lebih mengutamakan aspek estetika visual dan keuntungan ekonomi daripada menyertakan hak-hak dasar warga miskin.

Guy Debord menegaskan bahwa dalam spektakel masyarakat, kehidupan sosial berubah menjadi tontonan yang bisa dikomersialkan, sehingga kota berperan sebagai panggung besar yang mengutamakan citra dibandingkan kenyataan. Kota yang bersih, jalan rapi, taman dengan desain modern, dan pencahayaan menarik dipertontonkan bukan hanya demi kenyamanan warga, tetapi untuk menciptakan representasi kemajuan yang dijual secara simbolis kepada dunia. Namun, logika kapitalisme perkotaan ini menghadirkan paradoks yang jelas. Di satu sisi, kota dipromosikan sebagai simbol kemajuan dan modernitas, tetapi di sisi lain ribuan warga miskin kehilangan tempat tinggal, jaringan sosial, dan sumber penghidupan mereka akibat kebijakan penggusuran. Proses akumulasi modal ini berlangsung dengan mengorbankan hak-hak dasar masyarakat yang terpinggirkan,

⁸ Opcit

menampilkan bahwa modernisasi kota sering dibangun atas penderita kelompok rentan. Dalam konteks ini, spektakel kota tidak hanya mereproduksi citra kemajuan, tetapi juga menyembunyikan ketimpangan struktural yang dipertahankan oleh logika kapitalisme global.⁹

e. Penutupan Kampung Kumuh sebagai Kontrol Sosial

Selain sebagai instrumen kekuasaan dan kapitalisme, kebijakan ini juga berperan sebagai bentuk kontrol sosial. Warga miskin di New Delhi tidak hanya mengalami penggusuran, tetapi juga terjaga pergerakannya. Selama pelaksanaan KTT, pemerintah menutup pasar tradisional, membatasi aktivitas masyarakat, dan mengingatkan mereka agar tetap berada di rumah.

Kontrol tersebut bersifat simbolis sekaligus nyata secara fisik. Tirai hijau menentukan apa yang boleh dilihat, sementara aparat keamanan mengendalikan siapa yang diperbolehkan berada di ruang kota. Dengan cara ini, warga miskin dipaksa untuk "menghilang" dari narasi kota modern. Situasi ini menggambarkan eksklusi sosial yang terstruktur, di mana negara menetapkan siapa yang pantas menjadi bagian dari kota dan siapa yang harus dikeluarkan.

f. Penutupan Kampung Kumuh sebagai Pencitraan Negara

Kebijakan ini juga berperan sebagai strategi nation branding, yakni upaya terencana oleh negara untuk membangun dan memperkuat citra positif di mata komunitas internasional. Melalui penataan ruang kota dan penghapusan kampung kumuh, India berusaha menampilkan dirinya sebagai negara yang modern, inklusif, dan berpengaruh di panggung global. Fokus pada tampilan kota yang bersih, terorganisir, dan maju dimaksudkan untuk meyakinkan dunia bahwa India siap menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya internasional. Dengan menyembunyikan kemiskinan dari sorotan global, pemerintah tidak

⁹ Opcit

hanya mempromosikan narasi kemajuan pembangunan, namun juga menegaskan posisi India sebagai negara berkembang yang berhasil menghadapi tantangan modernitas.

Namun, upaya pencitraan ini menyimpan paradoks yang jelas. Di satu sisi, India berhasil menampilkan citra modern dan meyakinkan di hadapan komunitas internasional, namun di sisi lain, warga miskin justru menjadi korban proyek penataan kota yang fokus pada tampilan visual semata. Ribuan penghuni kampung kumuh digusur secara paksa, kehilangan tempat tinggal, dan hak sosial ekonomi mereka mengabaikan demi menjaga narasi kemajuan nasional. Situasi ini menggambarkan bahwa citra sebuah negara di forum internasional sering kali dibangun dengan mengorbankan realitas sosial yang sebenarnya, di mana penderitaan kelompok marginal disembunyikan di balik tampilan simbolik modernitas.

Guy Debord dalam *The Society of the Spectacle* menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, realitas sosial tidak lagi disajikan secara asli, melainkan ekosistem menjadi gambar, simbol, dan pertunjukan yang dapat dikonsumsi secara massal. Kota seperti panggung teater yang dapat diatur demi kepentingan politik dan ekonomi, sehingga ruang publik berubah dari tempat interaksi sosial menjadi alat untuk membangun citra tertentu. Hal ini terlihat jelas dalam penutupan kampung kumuh di India menjelang KTT G20, di mana kota modern diproyeksikan sebagai simbol kemajuan, keteraturan, dan kemakmuran, sementara kemiskinan sejati disembunyikan dari pandangan dunia internasional. Dengan demikian, proyek nation branding India bukan hanya diplomasi strategi visual, tetapi juga menegaskan bagaimana logika spektakel beroperasi di ruang perkotaan dan hubungan internasional, di mana citra lebih diutamakan daripada realitas sosial yang sebenarnya.

g. Dampak Sosial-Ekonomi

Kebijakan penutupan kampung kumuh di New Delhi menjelang KTT G20 2023 tidak hanya bertujuan untuk mempercantik citra kota

yang modern, tetapi juga menimbulkan dampak-dampak signifikan bagi masyarakat miskin. Dampak tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut :

1. Kehilangan Tempat Tinggal

Lebih dari 4.000 warga miskin dan tunawisma di New Delhi terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan resmi yang mampu maupun tidak layak dari pemerintah. Penggusuran dilakukan secara mendadak dengan menggunakan bulldoser untuk menghancurkan banyak rumah semi permanen dalam waktu yang sangat singkat, sehingga warga tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan barang-barang atau mencari tempat tinggal alternatif. Warga yang sebelumnya tinggal di daerah strategis dekat pusat kota, dengan akses yang lebih mudah ke lapangan kerja, fasilitas kesehatan, sekolah, dan transportasi umum, kini dipindahkan ke wilayah pinggiran yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi dan layanan sosial dasar.¹⁰

Relokasi paksa ini menimbulkan dampak sosial yang besar. Banyak keluarga kehilangan jaringan sosial dan komunitas yang selama ini menjadi sumber dukungan hidup mereka sehari-hari. Sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan tempat tinggal baru yang memadai, sehingga terpaksa hidup dengan mendirikan tenda darurat di lahan kosong atau tinggal di jalanan. Kondisi ini memperparah kerentanan mereka terhadap berbagai risiko seperti paparan cuaca ekstrem, penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih, serta meningkatnya kemungkinan kekerasan di ruang publik. Anak-anak yang terdampak juga berisiko terputus dari pendidikan

¹⁰ Republika Online, "Atas Nama Kecantikan, Kehidupan Warga Miskin Kota New Delhi Dihancurkan," tersedia di <https://internasional.republika.co.id/berita/s0hzby335/atas-nama-kecantikan-kehidupan-warga-miskin-kota-new-delhi-dihancurkan> , diakses pada 19 Agustus 2025.

karena jarak sekolah yang jauh dan situasi keluarga yang tidak stabil.

Situasi ini menyelesaikan krisis perumahan yang telah lama menjadi masalah struktural di India, terutama di kota-kota besar seperti New Delhi. Dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat, kebutuhan perumahan yang terjangkau akan semakin mendesak, namun kebijakan pemerintah justru lebih fokus pada pembangunan infrastruktur mewah dan proyek komersial yang menguntungkan investor serta kelas menengah atas. Hal ini menggambarkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak atas tempat tinggal yang sebagaimana layak diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), yang secara tegas menjamin hak setiap individu atas standar hidup yang berkemampuan, termasuk akses perumahan. Oleh karena itu, praktik penggusuran pemberian tanpa imbalan yang adil bukan hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban memberikan hak asasi manusia bagi warganya.

2. Kehilangan Mata Pencarian

Sebagian besar penduduk yang tinggal di kawasan kumuh umumnya bergantung pada sektor informal yang tidak menjamin pendapatan tetap maupun jaminan sosial. Contohnya adalah berjualan di pinggir jalan, menjadi tukang becak, buruh harian, atau pekerja rumah tangga dengan upah yang relatif rendah. Ketergantungan pada pekerjaan seperti ini membuat kondisi ekonomi mereka sangat rentan terhadap gangguan dari luar. Selama pelaksanaan KTT G20, penggusuran paksaan dan restrukturisasi kegiatan ekonomi oleh pemerintah menyebabkan mereka kehilangan akses ke sumber penghasilan utama yang selama ini menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Penggusuran

ini seringkali dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan dialog dengan warga, sehingga mengabaikan hak-hak mereka dan memperparah kondisi sosial ekonomi mereka.¹¹

Bagi masyarakat miskin di perkotaan, kehilangan satu hari kerja berarti tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, terutama kebutuhan pangan. Situasi ini semakin memburuk karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki tabungan atau aset yang dapat digunakan sebagai penyangga saat penghasilan tiba-tiba berhenti. Oleh karena itu, kehilangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial dan psikologis, sehingga keluarga harus menghadapi penayangan kehidupan yang berkepanjangan.

Kebijakan penertiban yang tidak disertai dengan solusi pengganti semakin meningkatkan tingkat keramahan sosial dan ekonomi ribuan keluarga. Alih-alih menciptakan citra kota yang lebih baik dan menampilkan kemajuan modern, tindakan tersebut malah membuat kelompok marjinal semakin terperosok dalam kemiskinan struktural. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan akses ke jaringan sosial, lingkungan kerja, serta peluang penghasilan. Oleh karena itu, kebijakan ini memperdalam siklus kerentanan ekonomi yang sulit untuk diatasi dan semakin meningkatkan posisi mereka dalam struktur sosial kota.

3. Dampak pada Pendidikan dan Kesehatan

Pemindahan penduduk yang padat ke wilayah pinggiran kota membuat anak-anak kesulitan mengakses pendidikan akibat jarak yang lebih jauh dan biaya transportasi yang membengkak. Akibatnya, banyak anak terpaksa putus sekolah. Selain itu, warga juga kehilangan kemudahan mendapatkan layanan

¹¹ Penggusuran dan Permukiman yang Layak, Indonesiana.id, diakses 21 Agustus 2025.
<https://www.indonesiana.id/read/93661/penggusuran-dan-permukiman-yang-layak>

kesehatan yang sebelumnya lebih mudah dijangkau di pusat kota. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berisiko menciptakan generasi baru yang hidup dalam kemiskinan dengan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang semakin terbatas.

4. Polarisasi Sosial dan Ruang Kota

Penutupan kawasan kumuh saat pelaksanaan KTT menciptakan paradoks dalam gambaran kota, yaitu terbentuknya dua citra kota yang saling berlawanan. Di satu sisi, pemerintah menampilkan kota yang modern, bersih, tertata rapi, dan menarik untuk memberikan kesan positif kepada delegasi internasional serta media global. Jalan utama dihias, kawasan strategis yang diberi sentuhan ornamen budaya khas, dan beberapa dipol bangunan agar mencerminkan citra kota yang maju dan beradab. Namun di sisi lain, ada sisi kota lain yang sengaja diutarakan: kota dengan kemiskinan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Bagian ini ditutupi dengan pagar seng atau tirai hijau agar tidak terlihat oleh tamu internasional, seolah-olah kenyataan tersebut tidak ada dalam gambaran kota.

Kebijakan seperti ini pada dasarnya memperkuat praktik eksklusi sosial yang terstruktur. Kehidupan masyarakat miskin di perkotaan dianggap tidak layak untuk dikembangkan, bahkan dipandang sebagai penghalang terhadap citra modernitas yang ingin dipromosikan ke dunia luar. Oleh karena itu, keberadaan mereka dianggap sebagai “masalah” yang harus disembunyikan, bukan sebagai bagian dari warga negara yang berhak menikmati hasil pembangunan kota. Eksklusi ini tidak hanya terjadi secara fisik melalui transmisi dan penggusuran, tetapi juga secara simbolis dengan menghapus keberadaan kelompok miskin dari gambaran resmi wajah kota.

Dampak langsung dari kebijakan tersebut adalah semakin meluasnya kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Kelompok kaya atau kelas menengah ke atas terus dapat

menikmati infrastruktur modern, fasilitas umum, serta ruang kota yang semakin tertata rapi, sementara kelompok miskin justru kehilangan akses terhadap tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan struktural yang kian sulit diatasi, karena kelompok miskin semakin terpinggirkan, sedangkan kelompok kaya semakin menghemat zona-zona eksklusif di perkotaan. Lebih jauh lagi, polarisasi ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial, dimana masyarakat miskin merasa terasing di kota yang sebenarnya juga merupakan bagian dari mereka.

Dengan kata lain, kebijakan penutupan kawasan kumuh bukan semata-mata langkah teknis untuk penataan kota dalam jangka pendek, melainkan juga sebuah tindakan simbolis yang memperkuat stratifikasi sosial di ruang perkotaan. Kota yang dipamerkan sebagai wajah kemajuan hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu saja, sementara bagian kota yang tersembunyi tetap menjadi “bayangan” yang menekan kehidupan masyarakat miskin. Dalam waktu lama, kondisi ini malah memperbesar ketimpangan, melemahkan kohesi sosial, dan menyebabkan terpecahnya masyarakat perkotaan.

5. Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintah

Warga yang mengalami penggusuran merasa dikhianati oleh pemerintah yang seharusnya berperan sebagai pelindung mereka. Bukannya memberikan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah malah menutupi masalah tersebut demi menjaga citra di mata dunia. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat miskin terhadap pemerintah dan berpotensi memicu ketidakpuasan sosial dalam jangka panjang.

6. Citra Global vs Realitas Lokal

Di mata dunia internasional, India sukses memproyeksikan dirinya sebagai negara yang modern. Namun, bagi masyarakat miskin yang terdampak, KTT G20 justru meninggalkan dampak sosial yang

menyakitkan. Perbedaan tampilan ini menggambarkan paradoks pembangunan, di mana citra internasional meningkat, sementara kondisi nyata di tingkat lokal justru semakin memburuk.

4. Simpulan

Penutupan kawasan kumuh di India menjelang KTT G20 2023 bukan sekadar upaya penataan kota, melainkan sebuah strategi politik yang rumit. Mengacu pada teori spektakel kota dari Guy Debord, kebijakan ini bertujuan memperkokoh kekuasaan, mendukung sistem kapitalisme, menerapkan kontrol sosial, serta membangun citra negara. Namun, strategi tersebut menimbulkan paradoks pembangunan, di mana citra internasional semakin kuat tetapi hak-hak dasar masyarakat miskin dikorbankan. Kota dijadikan seperti panggung pertunjukan bagi dunia, sementara penduduknya sendiri hanya diabaikan dalam narasi resmi.

Penutupan kawasan kumuh di India menjelang KTT G20 2023 menggambarkan secara nyata bagaimana kebijakan perkotaan dapat berfungsi sebagai alat politik, kapitalisme, dan pencitraan global. Dengan menggunakan teori spektakel kota dari Guy Debord, terlihat bagaimana realitas sosial dipermainkan hanya menjadi sebuah citra semu. Selain itu, teori-teori dari David Harvey, Henri Lefebvre, dan Michel Foucault menganalisis dengan menyoroti ruang kota sebagai arena perebutan kekuasaan, modal, dan makna sosial. Kebijakan tersebut memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan kota tidak boleh sekadar dijadikan strategi untuk memperindah citra negara di mata dunia, tetapi harus diarahkan pada keadilan sosial bagi seluruh warganya. Inklusivitas, keterlibatan masyarakat miskin, serta perlindungan hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan tata kota. Dengan demikian, pembangunan kota tidak hanya menciptakan citra global yang positif, tetapi juga memperkuat demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Kajian sosiologi perkotaan dengan menegaskan bahwa kebijakan penataan kota bukan praktik teknokratis yang netral, melainkan bagian dari relasi kekuasaan, kapitalisme, dan pencitraan negara. Melalui integrasi teori

spektakel (Debord), hak atas kota (Lefebvre), kapitalisme perkotaan (Harvey), dan kontrol sosial ruang (Foucault), penelitian ini menunjukkan bahwa penutupan kampung kumuh merupakan mekanisme eksklusi sosial yang dilegitimasi oleh agenda global dan kepentingan negara.

Dalam konteks Global South, temuan ini relevan karena memperlihatkan pola umum pembangunan kota berbasis mega-event dan diplomasi global yang mengorbankan hak-hak masyarakat miskin. Studi kasus India menegaskan paradoks pembangunan perkotaan di negara berkembang, di mana upaya membangun citra modern di tingkat global justru memperdalam ketimpangan sosial di tingkat lokal, sehingga menegaskan urgensi pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- COHRE. (2007). *Forced evictions: Violations of human rights*. Geneva, Switzerland: Centre on Housing Rights and Evictions.
- Debord, G. (2014). *The society of the spectacle* (K. Knabb, Trans.). Berkeley, CA: Bureau of Public Secrets. (Karya asli diterbitkan 1967)
- Dupont, V. (2011). The dream of Delhi as a global city. *International Journal of Urban and Regional Research*, 35(3), 533–554.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2010.01027.x>
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. New York, NY: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (pp. 87–104). Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Harvey, D. (2012). *Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution*. London, England: Verso.
- Indonesiana. (2018, May 14). *Pengusuran dan permukiman yang layak*.
<https://www.indonesiana.id/read/93661/pengusuran-dan-permukiman-yang-layak>
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space*. Oxford, England: Blackwell.

- Millington, K. (2006). *The impact of the Commonwealth Games 2010 on urban development of Delhi* (SSRN Working Paper No. 944832). Social Science Research Network.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=944832
- Ministry of Earth Sciences, Government of India. (2023). *India's G20 presidency and priorities*. <https://moes.gov.in/g20-india-2023/moes-g20>
- Republika Online. (2023, August 19). *Atas nama kecantikan, kehidupan warga miskin kota New Delhi dihancurkan*. <https://internasional.republika.co.id/>
- Shaw, M. (2014). Cities of spectacle: Urban revitalization, mega-events, and social exclusion. *Urban Studies*, 51(15), 3285–3302.
<https://doi.org/10.1177/0042098013515269>
- Smith, N. (2002). New globalism, new urbanism: Gentrification as global urban strategy. *Antipode*, 34(3), 427–450. <https://doi.org/10.1111/1467-8330.00249>
- Tempo.co. (2023, August 19). *Jelang KTT G20, kawasan kumuh di India lenyap dalam sekejap*. <https://www.tempo.co/>
- UN-Habitat. (2010). *The right to adequate housing*. Nairobi, Kenya: United Nations Human Settlements Programme.